

## **Melampaui *Force Protection*: Bagaimana Komponen Militer PBB Memungkinkan Implementasi Proses Perdamaian di Republik Afrika Tengah**

**Maychel Asmi\*, Dias Oldy Wiratama**

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Indonesia

Email: [maychelasmi1997@gmail.com](mailto:maychelasmi1997@gmail.com)\*, [diasoldy12@gmail.com](mailto:diasoldy12@gmail.com)

---

**Keywords:**

MINUSCA;  
the United Nations;  
Central African Republic;  
peace process;  
military component;  
protection of civilians;  
election security;  
State authorities.

---

**Abstract**

*This article examines how the military component of the United Nations contributes to the implementation of the peace process beyond the traditional functions of force protection. Focusing on the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), this article argues that peacekeepers can act as strategic enablers for political settlement by creating the security, mobility, and trust necessary for peace agreements to move from formal commitments to implementation at the field level. Methodologically, this article uses a qualitative single case study supported by process tracing and document analysis. The analysis is based on the 2019 Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic, MINUSCA's mandate document, the UN Secretary-General's report, and practitioner-based operational observations. This article identifies four supporting mechanisms: protection and deterrence, mobility and access, electoral security, and support for disarmament and expansion of state authority. Empirically, this article shows that patrols, escorts, temporary deployments, flight support, integrated election security planning, and coordination with national authorities can affect the credibility and sustainability of the peace process. The article also highlights a range of limitations, including limited resources, vast areas of operations, fragmentation of armed groups, host country sensitivities, and difficulties aligning military priorities with broader mission strategies. This article concludes that the implementation of peace processes in fragile environments requires not only political agreements, but also a security architecture that is disciplined and capable of protecting political space and translating strategic directions into practical outcomes.*

---

**Kata Kunci:**

MINUSCA;  
peacekeeping Perserikatan Bangsa-Bangsa;  
Republik Afrika Tengah;  
proses perdamaian;  
komponen militer;  
protection of civilians;  
keamanan pemilu;  
otoritas negara.

---

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji bagaimana komponen militer Perserikatan Bangsa-Bangsa berkontribusi terhadap implementasi proses perdamaian melampaui fungsi tradisional force protection. Dengan berfokus pada United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), artikel ini berargumen bahwa pasukan penjaga perdamaian dapat berperan sebagai strategic enablers bagi penyelesaian politik dengan menciptakan keamanan, mobilitas, dan kepercayaan yang diperlukan agar perjanjian perdamaian dapat bergerak dari komitmen formal menuju implementasi di tingkat lapangan. Secara metodologis, artikel ini menggunakan studi kasus tunggal kualitatif yang didukung oleh process tracing dan analisis dokumen. Analisis didasarkan pada Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic tahun 2019, dokumen mandat MINUSCA, laporan Sekretaris Jenderal PBB, serta observasi operasional berbasis praktisi. Artikel ini mengidentifikasi empat mekanisme pendukung: perlindungan dan deterrence, mobilitas dan akses, keamanan pemilu,

serta dukungan terhadap disarmament dan perluasan otoritas negara. Secara empiris, artikel ini menunjukkan bahwa patroli, escort, temporary deployment, dukungan penerbangan, perencanaan keamanan pemilu yang terintegrasi, dan koordinasi dengan otoritas nasional dapat memengaruhi kredibilitas dan keberlanjutan proses perdamaian. Artikel ini juga menyoroti berbagai keterbatasan, termasuk sumber daya yang terbatas, wilayah operasi yang luas, fragmentasi kelompok bersenjata, sensitivitas negara tuan rumah, dan kesulitan menyelaraskan prioritas militer dengan strategi misi yang lebih luas. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi proses perdamaian dalam lingkungan rapuh tidak hanya memerlukan perjanjian politik, tetapi juga arsitektur keamanan yang disiplin dan mampu melindungi ruang politik serta menerjemahkan arah strategis menjadi hasil praktis.

---

## PENDAHULUAN

Perjanjian perdamaian jarang dapat terimplementasi dengan sendirinya. Dalam lingkungan konflik yang rapuh, komitmen politik tetap rentan ketika kelompok bersenjata masih dapat mengintimidasi masyarakat, membatasi pergerakan, mengganggu pemilu, menghambat deployment negara, atau mengeksploitasi lemahnya institusi lokal. Karena itu, komponen militer dalam misi peacekeeping Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak seharusnya dipahami hanya sebagai instrumen force protection (Satnyoto 2017; Nurcahyawan dan Wisnu 2018; Hasan 2021). Komponen tersebut juga dapat berfungsi sebagai pendukung operasional bagi implementasi politik (Sihombing 2013; Desiana 2020).

Artikel ini mengkaji proposisi tersebut melalui kasus MINUSCA di Republik Afrika Tengah (CAR). MINUSCA beroperasi dalam konteks di mana proses perdamaian secara formal berakar pada Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic tahun 2019 (APPR-RCA), tetapi implementasinya tetap bergantung pada kondisi keamanan di tingkat lapangan. Perjanjian tersebut mencakup komitmen mengenai penghentian permusuhan, inklusi, desentralisasi, disarmament, otoritas negara, pemilu, dan mekanisme pemantauan (Central African Republic & signatory armed groups, 2019). Komitmen tersebut membutuhkan lebih dari sekadar persetujuan politik. Ia membutuhkan pergerakan yang aman, deterrence yang kredibel, perencanaan yang terkoordinasi, serta kemampuan aktor nasional dan misi untuk menjangkau komunitas terpencil.

Artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana komponen militer PBB memungkinkan implementasi proses perdamaian di CAR melampaui force protection? Artikel ini berargumen bahwa komponen militer memungkinkan implementasi melalui empat mekanisme. Pertama, komponen militer melindungi ruang politik dengan mencegah spoilers dan mengurangi ancaman langsung terhadap warga sipil dan otoritas publik. Kedua, komponen militer memungkinkan mobilitas melalui patroli, escort, pengamanan rute, dukungan penerbangan, dan temporary deployment. Ketiga, komponen militer mendukung keamanan pemilu, yang membantu mengubah kompetisi politik dari tekanan bersenjata menjadi proses institusional. Keempat, komponen militer mendukung disarmament dan perluasan otoritas negara dengan menciptakan kondisi keamanan minimum bagi DDR, administrasi lokal, dan pelayanan publik.

Kontribusi artikel ini bersifat empiris dan praktis. Artikel ini tidak menyatakan bahwa aktivitas militer saja dapat menghasilkan perdamaian. Sebaliknya, artikel ini berargumen bahwa implementasi proses perdamaian melemah ketika aktivitas militer diperlakukan sebagai

sesuatu yang terpisah dari jalur politik. Dalam peacekeeping multidimensional, strategi politik dan postur militer saling bergantung. Sebuah perjanjian politik membutuhkan keamanan agar kredibel. Sebuah postur keamanan membutuhkan arah politik agar tetap legitimate.

#### Peacekeeping dan Masalah Implementasi

Literatur peacekeeping menunjukkan bahwa misi PBB dapat mengurangi risiko konflik berulang dengan mengubah insentif, meningkatkan kepercayaan, memantau perilaku, dan menciptakan ruang bagi proses politik (Howard, 2019). Logika ini sangat relevan pasca-perang saudara, ketika para aktor dapat menandatangani perjanjian tetapi masih takut terhadap pengkhianatan, marginalisasi, atau kehilangan pengaruh. Peacekeeping dapat mengurangi ketakutan tersebut dengan mengubah perkiraan biaya kekerasan dan meningkatkan manfaat praktis dari kepatuhan.

Perjanjian perdamaian menghadapi apa yang dapat disebut sebagai masalah implementasi. Tanda tangan dapat diperoleh lebih cepat daripada pemulihan keamanan lokal. Kelompok bersenjata dapat secara formal menerima komitmen nasional, sambil tetap mempertahankan kekuatan koersif di lapangan. Stedman (1997) menggambarkan aktor semacam ini sebagai spoilers ketika mereka menggunakan kekerasan atau hambatan untuk merusak proses perdamaian. Walter (2002) juga menekankan pentingnya jaminan yang kredibel dalam penyelesaian perang saudara. Dalam pengertian ini, pasukan militer peacekeeping bukan sekadar pengamat pasif. Mereka dapat menyediakan sebagian dari struktur jaminan yang memungkinkan komitmen politik bertahan melampaui meja perundingan.

Penelitian terbaru lebih jauh menjelaskan bahwa misi peacekeeping dapat mendukung implementasi ketika diberi mandat dan mampu menegakkan ketentuan perjanjian perdamaian (Mailhot, 2025). Enforcement tidak boleh dipahami hanya sebagai combat. Ia juga mencakup pemantauan, deterrence, pendampingan, dukungan kepada otoritas nasional, dan penciptaan kondisi aman agar ketentuan yang disepakati dapat diimplementasikan. Hal ini secara langsung relevan dengan MINUSCA, yang mandatnya menggabungkan protection of civilians, dukungan terhadap proses perdamaian, dukungan pemilu, DDR, security sector reform, dan perluasan otoritas negara (United Nations Security Council [UNSC], 2025).

#### Dari Force Protection Menuju Strategic Enablement

Force protection tetap penting. Tanpa pangkalan yang aman, convoy yang terlindungi, dan operasi yang dapat bertahan, sebuah misi tidak dapat melaksanakan mandatnya. Namun, force protection adalah sarana, bukan tujuan strategis akhir. UN Capstone Doctrine mendefinisikan peacekeeping sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun perdamaian berkelanjutan dan menekankan consent, impartiality, dan non-use of force kecuali untuk self-defence serta defence of the mandate. High-Level Independent Panel on Peace Operations juga menekankan primacy of politics, yang berarti bahwa aktivitas operasional harus dipandu oleh strategi politik (High-Level Independent Panel on Peace Operations, 2015).

Karena itu, artikel ini menggunakan konsep strategic enablement. Dalam kerangka ini, komponen militer memungkinkan proses perdamaian ketika aktivitasnya membantu aktor politik dan sipil melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah sebuah patroli mencegah serangan, tetapi apakah patroli tersebut menjaga freedom of movement, mendukung akses pemilu, meyakinkan masyarakat, memungkinkan DDR, atau membuat perwakilan negara dapat beroperasi. Kontribusi militer paling bernilai ketika ia melindungi proses politik tanpa menggantikannya.

## Kerangka Analitis

Artikel ini menerapkan empat mekanisme analitis untuk menilai hubungan antara aktivitas militer dan implementasi proses perdamaian di CAR.

**Tabel I.** Mekanisme Pendukung Militer Bagi Implementasi Proses Perdamaian

Mekanisme	Aktivitas militer	Kontribusi yang diharapkan terhadap implementasi proses perdamaian
<b>Perlindungan dan Deterrence</b>	Patroli, <i>temporary deployment</i> , <i>area security</i> , perlindungan lokasi utama, postur <i>deterrent</i> .	Mengurangi kapasitas <i>spoilers</i> , melindungi warga sipil dan otoritas lokal, serta menjaga kepercayaan terhadap proses.
<b>Mobilitas dan Akses</b>	Escort, pengamanan rute, dukungan penerbangan, dukungan logistik, <i>rapid response</i> , fasilitasi jalan dan <i>airfield</i> .	Memungkinkan aktor pemilu, kemanusiaan, administrasi, dan DDR menjangkau wilayah terpencil.
<b>Keamanan Pemilu</b>	Perencanaan keamanan pemilu terpadu, dukungan kepada <i>national forces</i> , perlindungan material dan personel pemilu, postur pasca-pemilu.	Membantu kompetisi politik berlangsung melalui institusi, bukan melalui gangguan bersenjata.
<b>DDR dan Otoritas Negara</b>	Keamanan untuk operasi disarmament, dukungan <i>deployment</i> pejabat, koordinasi dengan <i>national forces</i> dan komponen sipil.	Mengubah komitmen bersenjata menjadi implementasi administratif, hukum, dan politik di lapangan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan desain studi kasus tunggal kualitatif. Studi kasus tunggal tepat digunakan karena MINUSCA menyediakan contoh yang jelas mengenai misi peacekeeping multidimensional yang beroperasi ketika perjanjian perdamaian formal hidup berdampingan dengan insecurity yang berlanjut, fragmentasi kelompok bersenjata, tekanan pemilu, dan tantangan otoritas negara. Penelitian studi kasus berguna ketika tujuannya adalah mengidentifikasi mekanisme kausal, bukan memperkirakan efek rata-rata di banyak kasus (Yin, 2018).

Metode yang digunakan menggabungkan process tracing dan analisis dokumen. Process tracing digunakan untuk menguji apakah aktivitas militer secara masuk akal terhubung dengan outcome implementasi yang dapat diamati, seperti peningkatan akses pemilu, kemajuan DDR, perlindungan warga sipil, atau deployment pejabat negara (Beach & Pedersen, 2019). Analisis dokumen berfokus pada APPR-RCA, mandat Dewan Keamanan, laporan Sekretaris Jenderal, dan pedoman peacekeeping PBB. Observasi operasional berbasis praktisi hanya digunakan sebagai interpretasi kontekstual. Observasi tersebut tidak digunakan untuk mengungkap informasi sensitif atau menggantikan bukti publik.

Artikel ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, artikel ini tidak mengukur efek kausal penuh MINUSCA terhadap proses perdamaian CAR. Kedua, artikel ini tidak mengevaluasi seluruh aktivitas sipil, polisi, dan politik misi. Ketiga, artikel ini tidak mengklaim bahwa aksi militer cukup untuk menghasilkan perdamaian. Tujuan yang lebih sempit adalah menjelaskan bagaimana postur dan aktivitas militer dapat memungkinkan implementasi komitmen politik dalam kondisi lapangan yang sulit.

## **Konteks Kasus: Proses Perdamaian CAR dan MINUSCA**

APPR-RCA ditandatangani pada Februari 2019 antara Pemerintah CAR dan kelompok-kelompok bersenjata. Perjanjian ini menegaskan persatuan nasional, integritas wilayah, inklusi, penolakan kekerasan sebagai ekspresi politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlunya implementasi dengan itikad baik (Central African Republic & Signatory Armed Groups, 2019). Perjanjian ini juga mengaitkan security sector reform, DDR, desentralisasi, pemilu, keadilan, dan mekanisme implementasi lokal. Karena itu, perjanjian tersebut memperlakukan perdamaian bukan sebagai satu peristiwa, tetapi sebagai rangkaian tindakan politik, keamanan, dan administratif.

Mandat MINUSCA berkembang mengikuti lingkungan implementasi ini. Berdasarkan Security Council resolution 2800 (2025), mandat misi diperbarui hingga 15 November 2026, dengan protection of civilians sebagai prioritas dan tugas-tugas berkelanjutan terkait proses perdamaian, dukungan pemilu, perluasan otoritas negara, DDR, security sector reform, dan dukungan kepada otoritas nasional (UNSC, 2025). Mandat ini menempatkan komponen militer di dalam arsitektur politik yang lebih luas. Peran militer tidak terpisah dari implementasi politik; ia merupakan salah satu kondisi yang membuat implementasi mungkin terjadi.

Pelaporan terbaru PBB menunjukkan hubungan yang berkelanjutan antara keamanan dan implementasi. Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa pemilu Desember 2025 mendominasi periode pelaporan, sementara kemajuan juga dicapai dalam proses perdamaian, termasuk operasi DDR dan kembalinya kelompok bersenjata MPC ke Political Agreement tahun 2019 (United Nations Secretary-General, 2026). Laporan yang sama mencatat bahwa MINUSCA memberikan dukungan keamanan di bawah Integrated Elections Security Plan, berkoordinasi dengan Defence and Internal Security Forces Entral Africa Republic, dan mendukung pengembalian material serta hasil pemilu ke Bangui (UNSG, 2026).

Kasus ini juga menunjukkan bahwa capaian keamanan tetap tidak merata. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2026 mencatat bahwa pemungutan suara dilakukan di 6.679 dari 6.700 polling centres, tetapi beberapa polling stations di Haut-Mbomou tidak dibuka karena insecurity, termasuk di Zemio dan Bambouti (UNSG, 2026). Di wilayah yang sama, elemen AAKG menyerang National Defence Forces, material pemilu, kandidat, konvoi, dan otoritas lokal. MINUSCA merespons dengan memperkuat postur, mendukung rotasi dan reinforcement National Defence Forces, serta meningkatkan patroli (UNSG, 2026). Rincian ini menunjukkan mengapa implementasi perdamaian di CAR tidak dapat dinilai hanya di tingkat nasional. Ujian penentunya sering kali bersifat lokal dan operasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Empiris**

#### **Perlindungan dan Deterrence: Menjaga Ruang Politik**

Mekanisme pendukung pertama adalah perlindungan dan deterrence. Di CAR, kekerasan terhadap warga sipil, perwakilan negara, kandidat, aktor kemanusiaan, dan national forces dapat secara langsung melemahkan proses perdamaian. Kekerasan mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik dan memberi sinyal bahwa aktor bersenjata masih memiliki veto power atas kehidupan politik. Pasukan militer Peacekeeping membantu mengurangi veto power tersebut ketika mereka mencegah serangan, melindungi masyarakat, dan mencegah kekerasan lokal berubah menjadi gangguan strategis (Nindya 2018).

Aktivitas AAKG di Haut-Mbomou menggambarkan hal tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal PBB, operasi AAKG berupaya mengganggu proses pemilu di tingkat lokal dengan membatasi pergerakan, mengintimidasi masyarakat, serta menyerang perwakilan negara dan otoritas lokal (UNSG, 2026). Pada hari pemilu di Bambouti, elemen AAKG menyerang National Defence Forces, membakar material pemilu, menculik otoritas lokal dan personel pemilu, serta memaksa penutupan seluruh lima polling stations di wilayah tersebut. Di Zemio, kelompok tersebut menyerang posisi National Defence & Security Forces di airstrip, Gendarmerie, dan rumah sakit lokal; MINUSCA dikerahkan ke wilayah tersebut, memukul mundur para penyerang, mengamankan Gendarmerie dan rumah sakit, serta berpatroli di lingkungan yang rentan untuk melindungi warga sipil (UNSG, 2026).

Tindakan-tindakan ini lebih dari sekadar force protection. Tindakan tersebut melindungi ruang politik minimum yang diperlukan bagi pemilu, administrasi lokal, dan kepercayaan masyarakat. Ketika pasukan Peacekeeping mengamankan rumah sakit, airstrip, Gendarmerie, atau lingkungan masyarakat, mereka tidak hanya mempertahankan lokasi taktis. Mereka juga mempertahankan infrastruktur tempat negara dan proses perdamaian tetap terlihat oleh penduduk. Ini adalah bentuk praktis dari implementasi mandat.

### **Mobilitas dan Akses: Membuat Implementasi Menjangkau Lapangan**

Mekanisme kedua adalah mobilitas dan akses. Geografi CAR membuat fungsi ini sangat penting. Jarak yang luas, infrastruktur jalan yang lemah, kendala musiman, dan insecurity berarti keputusan politik di Bangui sering tidak dapat diimplementasikan tanpa pergerakan yang didukung oleh militer. Implementasi perdamaian membutuhkan pergerakan orang dan material: staf pemilu, surat suara, tim DDR, administrator sipil, national forces, aktor kemanusiaan, dan personel misi.

Komponen militer MINUSCA memungkinkan hal ini melalui escort, patroli, air mobility, pengamanan jalan, dan rapid response. Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa MINUSCA dan UNDP mendukung deployment dan pengembalian material pemilu, termasuk pengembalian lebih dari 28 ton material dan hasil pemilu ke Bangui setelah pemungutan suara (UNSG, 2026). Laporan tersebut juga mencatat bahwa MINUSCA menyediakan non-lethal equipment kepada 121 security units, mengawal 48 konvoi material pemilu dan agen National Electoral authority, serta menyelenggarakan sesi pelatihan bagi personel polisi dan Gendarmerie (UNSG, 2026). Aktivitas ini menerjemahkan komitmen politik menjadi implementasi fisik.

Mobilitas juga relevan bagi adaptasi mandat. Pada 2025, MINUSCA mengadopsi military and police concepts of operations yang direvisi untuk meningkatkan fleksibilitas operasional, memperluas force layout dari tiga menjadi empat sektor, dan memperbaiki infrastruktur mobilitas, termasuk rehabilitasi jalan dan pekerjaan airstrip di Bria, Paoua, dan Mboki (UNSG, 2025). Langkah-langkah ini mungkin tampak logistik, tetapi memiliki makna politik. Proses perdamaian tidak dapat diimplementasikan di tempat misi dan otoritas nasional tidak dapat bergerak. Karena itu, mobilitas adalah kondisi strategis, bukan isu administratif sekunder.

### **Keamanan Pemilu: Melindungi Kompetisi Institusional**

Mekanisme ketiga adalah keamanan pemilu. Dalam lingkungan pasca-konflik, pemilu bukan hanya kegiatan administratif. Pemilu dapat mengonsolidasikan transisi politik atau justru mereproduksi konflik melalui intimidasi, eksklusi, dan kekerasan. APPR-RCA

mewajibkan para pihak untuk mendukung pemilu yang bebas, adil, inklusif, transparan, dan kredibel sebagai jalan menuju pergantian politik dan konsolidasi demokrasi (Central African Republic & signatory armed groups, 2019).

Dukungan MINUSCA terhadap proses pemilu Desember 2025 menunjukkan bagaimana aktivitas militer dan keamanan dapat memungkinkan komitmen tersebut. Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa MINUSCA berhasil melaksanakan mandat dukungan pemilu secara multidimensional melalui good offices, dukungan teknis dan logistik, serta dukungan keamanan di bawah integrated elections security plan (UNSG, 2026). Pemungutan suara berlangsung di hampir seluruh polling centres yang direncanakan, dan para pengamat nasional maupun internasional melaporkan bahwa pemungutan suara secara umum berlangsung dalam suasana tenang dan damai, meskipun terdapat tantangan logistik, insiden terbatas, dan irregularities (UNSG, 2026).

Signifikansi empirisnya bukan bahwa pemilu berlangsung tanpa masalah. Laporan tersebut mencatat kekhawatiran oposisi, appeals, insecurity di beberapa wilayah, dan penutupan polling stations di Haut-Mbomou. Signifikansinya adalah bahwa dukungan keamanan misi membantu membatasi gangguan secara cukup sehingga sebagian besar proses pemilu dapat berjalan. Dalam konteks proses perdamaian, hal ini penting karena pemilu memindahkan kompetisi ke dalam saluran institusional. Karena itu, dukungan militer terhadap keamanan pemilu berkontribusi secara tidak langsung terhadap legitimasi politik.

#### **DDR dan Perluasan Otoritas Negara: Mengubah Komitmen Menjadi Praktik**

Mekanisme keempat adalah dukungan terhadap DDR dan perluasan otoritas negara. APPR-RCA menghubungkan DDR, security sector reform, desentralisasi, dan tata kelola lokal. Komitmen ini membutuhkan kondisi aman untuk disarmament, reintegration, dan kehadiran pejabat publik.

Sekretaris Jenderal PBB melaporkan bahwa Pemerintah, dengan dukungan MINUSCA, melanjutkan operasi DDR untuk elemen UPC, 3R, MPC, faksi anti-balaka, Seleka Renovee, dan elemen yang berafiliasi dengan FPRC. Dari 14 kelompok bersenjata penandatanganan awal, sembilan dianggap telah sepenuhnya dibubarkan dan dilucuti. Per 1 Februari 2026, 1.202 kombatan telah dilucuti dan didemobilisasi sejak Juli 2025, dengan 720 senjata, 135 granat dan ordnance lainnya, serta tujuh roket dikumpulkan. Sejak penandatanganan Political Agreement tahun 2019, 6.000 kombatan telah dilucuti (UNSG, 2026).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa DDR bukan hanya program teknis. DDR adalah bagian dari penyelesaian politik. Keamanan militer membantu menciptakan lingkungan di mana kombatan dapat berkumpul, senjata dapat dikumpulkan, national forces dapat berfokus pada keamanan pemilu, dan reintegration dapat berjalan. Peran militer bersifat enabling, bukan mengambil alih proses. Pilar politik dan sipil tetap sentral, tetapi keduanya bergantung pada kondisi yang aman.

Logika yang sama berlaku bagi otoritas negara. Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa MINUSCA terus mendukung pemulihan dan perluasan otoritas negara, dengan 20 prefektur dan 82 sub-prefektur beroperasi penuh, meningkat 65,3 persen sejak 2024. Selama periode pemilu, para prefek dan sub-prefek, dengan bantuan MINUSCA, mengoordinasikan persiapan pemilu, mendukung National Electoral Authority, berhubungan dengan national security forces, dan berkontribusi pada pelayanan publik (UNSG, 2026). Hal ini menunjukkan bagaimana dukungan keamanan dan tata kelola lokal saling terhubung. Sebuah perjanjian

perdamaian memperoleh kredibilitas ketika masyarakat melihat otoritas negara beroperasi di tempat-tempat yang sebelumnya didominasi oleh aktor bersenjata.

### **Koordinasi Terintegrasi: Menyelaraskan Aksi Militer dengan Strategi Misi**

Elemen lintas-sektoral terakhir adalah koordinasi terintegrasi. MINUSCA adalah misi multidimensional. Komponen militernya tidak dapat mengimplementasikan proses perdamaian sendirian. Komponen militer harus bekerja bersama pilar politik, komponen polisi, human rights, civil affairs, DDR, electoral support, mission support, dan otoritas nasional. Integrasi penting karena aksi militer tanpa penyelarasan politik dapat menjadi aktif secara taktis tetapi lemah secara strategis.

Integrated Elections Security Plan adalah contoh yang berguna. Dukungan keamanan MINUSCA dikoordinasikan dengan Defence and Internal Security Forces of Republic of Central Africa sementara UNDP dan electoral authorities menangani procurement, training, dan deployment material serta personel pemilu (UNSG, 2026). Pembagian kerja ini mencerminkan penggunaan terbaik kemampuan militer: memungkinkan pergerakan dan kehadiran yang aman, sementara aktor sipil dan nasional memimpin proses politik dan administratif.

Hal ini juga mencerminkan doktrin PBB yang lebih luas. Capstone Doctrine menekankan integrated mission planning dan hubungan antara Peacekeeping dan proses politik yang lebih luas. Laporan HIPPO juga berargumen bahwa politik harus mengarahkan desain dan implementasi Peace Operations (HIPPO, 2015). Dalam kasus CAR, ini berarti komponen militer paling efektif ketika posturnya selaras dengan prioritas mandat, analisis politik lokal, dan kebutuhan lapangan.

### **Kendala dan Risiko**

Peran enabling dari komponen militer penting, tetapi tidak tanpa batas. MINUSCA menghadapi setidaknya lima kendala.

Pertama, geografi dan sumber daya membatasi cakupan. Wilayah CAR sangat luas, infrastrukturnya lemah, dan banyak lokasi membutuhkan pergerakan udara atau perjalanan darat yang panjang. Bahkan komponen militer yang besar tidak dapat menyediakan kehadiran permanen di semua tempat. Hal ini menciptakan gap antara ekspektasi mandat dan jangkauan operasional.

Kedua, fragmentasi kelompok bersenjata mempersulit implementasi. Beberapa aktor kembali ke perjanjian perdamaian, sementara yang lain tetap berada di luar, terpecah, atau beroperasi melalui jaringan lokal. Kemajuan DDR dengan beberapa kelompok tidak menghilangkan kekerasan lokal, sebagaimana terlihat di Haut-Mbomou. Fragmentasi membuat implementasi tidak merata.

Ketiga, sensitivitas negara tuan rumah membutuhkan keseimbangan yang hati-hati. Dukungan kepada otoritas nasional diperlukan untuk otoritas negara, tetapi peacekeeping PBB harus tetap impartial dan konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia. Misi harus menghindari persepsi sebagai pengganti otoritas nasional atau sebagai pihak dalam kompetisi politik lokal.

Keempat, prioritas militer dapat berbeda dari prioritas misi yang lebih luas jika koordinasi lemah. Force protection, convoy security, dan kesiapan operasional adalah hal penting, tetapi semuanya harus terhubung dengan efek politik. Sebuah patroli seharusnya

dinilai tidak hanya dari jarak yang ditempuh atau insiden yang dicegah, tetapi juga dari apakah patroli tersebut meningkatkan kepercayaan warga sipil, akses, atau implementasi.

Kelima, tekanan sumber daya dapat mengurangi fleksibilitas. Sekretaris Jenderal mencatat pada 2025 bahwa liquidity challenges memengaruhi fleksibilitas operasional dan perencanaan MINUSCA, serta sampai batas tertentu melemahkan mandate delivery (UNSG, 2025). Kendala semacam ini secara langsung memengaruhi kemampuan komponen militer untuk bergerak, mempertahankan kehadiran, dan merespons secara cepat.

Kasus CAR mendukung argumen utama bahwa komponen militer PBB dapat memungkinkan implementasi proses perdamaian melampaui force protection. Bukti menunjukkan bahwa aktivitas militer relevan dengan beberapa langkah praktis implementasi: mengamankan proses pemilu, mendukung DDR, melindungi otoritas lokal, memungkinkan pergerakan nasional dan misi, serta mempertahankan kehadiran di wilayah rentan.

Temuan ini membantu mempertajam cara menilai efektivitas militer dalam Peacekeeping multidimensional. Ukuran militer tradisional seperti jumlah patroli, jumlah konvoi, atau waktu respons berguna tetapi tidak lengkap. Pertanyaan yang lebih strategis adalah apakah aktivitas militer mengubah lingkungan implementasi. Apakah aktivitas tersebut memungkinkan pemilu berjalan? Apakah aktivitas tersebut memungkinkan tim DDR bekerja? Apakah aktivitas tersebut membuat otoritas lokal terlihat? Apakah aktivitas tersebut mengurangi kepercayaan diri spoilers? Apakah aktivitas tersebut memungkinkan pilar sipil melaksanakan tugasnya?

Temuan ini juga mendukung pemahaman yang seimbang mengenai robust peacekeeping. Robustness tidak berarti mengganti politik dengan kekuatan. Di CAR, fungsi militer yang paling berguna bukanlah aksi ofensif demi aksi itu sendiri. Fungsi yang paling berguna adalah dukungan yang disiplin terhadap implementasi mandat. Ini dapat mencakup deterrence, rapid response, protection of civilians, convoy security, dan dukungan kepada national forces, tetapi selalu dalam strategi politik dan prinsip-prinsip PBB.

Konsep strategic enablement berguna bagi praktisi dan akademisi. Konsep ini menghindari dua ekstrem. Ia menghindari pandangan sempit yang mereduksi military peacekeeping menjadi base defence. Ia juga menghindari pandangan berlebihan yang mengharapkan komponen militer menyelesaikan konflik politik. Komponen militer memungkinkan proses; ia tidak memilikinya.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini mengkaji bagaimana komponen militer PBB memungkinkan implementasi proses perdamaian melampaui force protection, dengan menggunakan MINUSCA sebagai studi kasus tunggal. Artikel ini menemukan bahwa komponen militer berkontribusi melalui perlindungan dan deterrence, mobilitas dan akses, keamanan pemilu, dukungan DDR, perluasan otoritas negara, dan koordinasi terintegrasi dengan pilar sipil dan polisi.

Kasus CAR menunjukkan bahwa implementasi perdamaian bersifat operasional sekaligus politik. Sebuah perjanjian perdamaian menciptakan komitmen, tetapi keamanan yang didukung militer sering menentukan apakah komitmen tersebut dapat menjangkau masyarakat. Patroli, escort, temporary deployment, dukungan penerbangan, dan perencanaan terintegrasi dapat memengaruhi apakah pemilu terlaksana, apakah kombatan melucuti senjata, apakah pejabat negara dapat deploy, dan apakah warga sipil mempercayai proses tersebut.

Implikasi kebijakan utamanya jelas: komponen militer PBB harus direncanakan dan dinilai sebagai strategic enablers bagi implementasi politik. Force protection tetap diperlukan, tetapi harus melayani tujuan yang lebih luas. Dalam lingkungan rapuh seperti CAR, proses perdamaian tidak hanya membutuhkan perjanjian yang dinegosiasikan, tetapi juga arsitektur keamanan yang kredibel dan disiplin, yang mampu melindungi ruang politik, mendukung mobilitas, mencegah spoilers, dan menerjemahkan bahasa mandat ke dalam hasil di tingkat lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press.
- Desiana NKA. 2020. Analisis Kendala Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Memberikan Sanksi Hukuman Di Tinjau Dari Icj (International Court Of Justice). *J. Pacta Sunt Servanda*. 1(2):117–133.
- Central African Republic and signatory armed groups. (2019). Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic. PA-X Peace Agreements Database. <https://www.peaceagreements.org/agreements/wgg/2147/>
- Hasan NI. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Personel Pemelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konvensi Jenewa 1949.
- High-Level Independent Panel on Peace Operations. (2015). *Uniting our strengths for peace: Politics, partnership and people* (A/70/95-S/2015/446). United Nations.
- Howard, L. M. (2019). *Power in peacekeeping*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108557689>
- Hultman, L., Kathman, J., & Shannon, M. (2014). Beyond keeping peace: United Nations effectiveness in the midst of fighting. *American Political Science Review*, 108(4), 737-753. <https://doi.org/10.1017/S0003055414000446>
- Mailhot, C. (2025). How UN peacekeeping missions enforce peace agreements. *American Journal of Political Science*, 69(2), 669-684. <https://doi.org/10.1111/ajps.12853>
- Nindya KS. 2018. Kepentingan Negara dalam Peacekeeping Operations PBB di Darfur tahun 2008-2017.
- Nurcahyawan T, Wisnu L. 2018. Efektivitas sanksi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap konflik bersenjata di Suriah. *Era Hukum-Jurnal Ilm. Ilmu Huk.* 16(1).
- Satnyoto A. 2017. Justifikasi Intervensi Internasional dalam Konflik Suatu Negara. *J. Asia Pacific Stud.* 1(2):209–219.
- Sihombing M. 2013. Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Kekuatan Bersenjata oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *J. Int. Law.*
- United Nations Secretary-General. (2025). *Central African Republic: Report of the Secretary-General* (S/2025/383). United Nations.
- United Nations Secretary-General. (2026). *Central African Republic: Report of the Secretary-General* (S/2026/71). United Nations.
- United Nations Security Council. (2025). *Resolution 2800 (2025) (S/RES/2800(2025))*. United Nations.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.